

**PRAKIRAAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI BBM  
PADA USAHA PERIKANAN  
(Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman)  
*Possibility Impact of Fuel Reduction to Fisheries Sector  
(Case Study : Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPSNZ))***

**\*Subhechanis Saptanto dan Rizki Aprilian Wijaya**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

\*email: anis\_saptanto@yahoo.com

Diterima 25 Januari 2014 - Disetujui 29 Nopember 2014

**ABSTRAK**

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) merupakan salah satu pelabuhan perikanan samudera di Indonesia yang terletak di Muara Baru, Jakarta Utara. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis perkembangan kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut jumlah kapal, stratifikasi GT, lokasi penangkapan (WPP) dan fluktuasi produksi ikan bulanan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, statistik perikanan dan berbagai referensi yang mendukung kegiatan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan yang didaratkan di PPSNZ pada tahun 2013 ada sebanyak 113.024.086 kg dengan rata-rata produksi perbulan sebanyak 9.418.674 kg. Rata-rata kenaikan produksi ikan perbulan sebesar 6,10 %. Kapal dengan ukuran 51-100 GT merupakan jenis kapal yang paling banyak mendaratkan ikan di PPSNZ. Bila dilihat dari lokasi penangkapannya, paling banyak yang menangkap ikan di WPP 711 yakni di perairan Laut Natuna. Pengurangan subsidi BBM diperkirakan memberikan dampak negatif kepada pelaku usaha perikanan khususnya yang berangkat dan mendaratkan ikan di PPS Nizam Zachman yakni berkurangnya kesejahteraan nelayan karena nelayan tidak melaut, peningkatan harga ikan karena berkurangnya supply ikan dari nelayan dan meningkatnya illegal fishing karena kapal-kapal di atas 30 GT sedikit yang melaut.

**Kata Kunci:** PPS Nizam Zachman, WPP, produksi ikan

**ABSTRACT**

*Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPSNZ) is one of Indonesia's ocean fishing port where located in Muara Baru, North Jakarta. This research was aimed to analyze the development of fishing vessels landed in PPSNZ according to the number of vessels, GT stratification, fish ground (WPP) and fish production fluctuation monthly. Data used in this research were secondary data derived from annual reports, fisheries statistics and the various references that support the research activities. Data analysis was performed using descriptive statistical methods. The results showed that the total production of fish landed in PPSNZ in 2013 there were as many as 113,024,086 kg with average monthly production as much as 9,418,674 kg. The average increase in fish production of 6.10% per month. Vessels of 51-100 GT is a type of the most fishing vessels landed in PPSNZ. Viewed from the fishing ground, most fishing ground were in the WPP 711 in the Natuna Sea region. Reduction of fuel subsidies estimated negative impact to businesses in particular fisheries departing and landing fish in PPS Nizam Zachman such as reduced welfare of fishers because fishers can't fishing, fish price increase due to the reduced supply of fish from fishers and increasing illegal fishing for over 30 GT vessels less operation.*

**Keywords:** Nizam Zachman Ocean Fishing Port, Fishing Ground Area, fish production

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian rakyatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dimana di dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kegiatan penangkapan ikan. Sektor perikanan memberikan sumbangan PDB sekitar 6,75 % dari total PDB nasional pada triwulan III tahun 2014 (BPS, 2014). Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan sumbangan PDB sebesar 7% pada rencana pembangunan 2015-2019 (Suryowati, 2015). Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan dalam kegiatan penangkapan ikan adalah adanya pelabuhan perikanan. Infrastruktur yang semakin baik dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap laut. Pada tahun 2012 produksi perikanan tangkap laut sebesar 5,4 juta ton meningkat sebesar 5,56 % pada tahun 2013 sebesar 5,7 juta ton (KKP, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/Men/2006, Pelabuhan Perikanan laut merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan .

Pelabuhan Perikanan seringkali menjadi barometer majunya perikanan disuatu daerah atau wilayah karena kita dengan cepat melihat perkembangan unsur-unsur yang berperan dalam usaha perikanan seperti ikan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, nelayan, pengusaha perikanan dan pasar ikan (Mahyuddin, 2013). Pelabuhan perikanan di Indonesia dapat dibagi menurut kelas dimana terdapat empat kelas pelabuhan perikanan yaitu : 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS); 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dari keempat pelabuhan perikanan tersebut, PPS merupakan pelabuhan perikanan paling besar dan memiliki kriteria teknis sebagai berikut: a) melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas; b) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT; c) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-

kurangnya minus 3 m; d) mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus; e) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; dan f) terdapat industri perikanan. Hingga tahun 2012 pemerintah telah membangun dan mengembangkan pelabuhan perikanan di Indonesia sebanyak 816 unit yang terdiri dari 6 unit Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 14 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 45 unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 749 unit Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan 2 unit pelabuhan perikanan swasta. Salah satu pelabuhan perikanan samudera adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) yang terletak di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Berdasarkan Sinaga (2013), Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) berlokasi di Muara Baru (Teluk Jakarta), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35/AL.003/PHB-82 PPSNZJ berlokasi pada koordinat: 106° - 48' - 15" T dan 06° - 06' - 18" S; 106° - 47' - 54" T dan 06° - 06' - 20" S; 106° - 48' - 14" T dan 06° - 05' - 32" S; dan 106° - 47' - 44" T dan 06° - 05' - 34" S. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) mulai di bangun pada tahun 1980 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 17 juli 1984 dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSNZJ). Sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 04/MEN/2004 tentang perubahan nama, maka nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).

BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diperuntukkan bagi nelayan selalu menjadi isu yang menarik. Terlebih lagi BBM merupakan faktor terpenting bagi nelayan dalam menangkap ikan karena sekitar 70 % pengeluaran nelayan digunakan untuk membeli BBM (Anonim<sup>1a</sup>), 2014). Sehingga tidak salah jika pemberian subsidi BBM bagi nelayan merupakan hal strategis karena sudah menjadi kebutuhan pokok nelayan sama halnya seperti pupuk bagi petani. Menurut Rosalina (2014) dinyatakan bahwa jumlah SPBN yang tersedia di seluruh Indonesia baru sekitar 300 unit, padahal kebutuhannya mencapai 600 unit. Jumlah kuota solar bersubsidi yang disediakan hanya sekitar 1,6 juta kiloliter dari kebutuhan rata-rata per tahun 2,5 juta kiloliter per tahun. Pada saat ini terjadi pembatasan kuota BBM dimana Pertamina melakukan pengurangan penyaluran harian

premium bersubsidi sebesar 5 % di setiap SPBU. Misalkan jika SPBU menjual 20 ribu liter premium bersubsidi dengan adanya pembatasan itu maka di SPBU dilakukan pemotongan sebesar 1000 liter. Pemotongan itu akan dikompensasi dengan premium non subsidi. Pertamina melakukan pemotongan jatah 10 - 15 % jatah solar bersubsidi pada SPBU. Menurut data Pertamina kuota BBM pada tahun 2014 sebanyak 48 juta kiloliter (KL) dan perseroan mendapat jatah 47,04 juta KL. Jumlah tersebut terdiri atas premium bersubsidi 32 juta KL, solar bersubsidi 14,14 juta KL dan minyak tanah 900 ribu KL. Namun pada APBN-P, jatah BBM bersubsidi dikurangi sebanyak 2 juta KL. Kuota BBM bersubsidi pun berkurang menjadi 45,35 juta KL yang terdiri atas premium 29,29 juta KL, solar 15,16 juta KL dan minyak tanah 900 ribu KL. Hal tersebut di atas diduga dapat berdampak negatif pada sektor perikanan karena input terbesar sebesar 70 % digunakan untuk BBM.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis perkembangan kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut jumlah kapal, stratifikasi GT, lokasi penangkapan (WPP), fluktuasi produksi ikan bulanan dan memperkirakan dampak dari adanya kebijakan pembatasan kuota BBM.

**METODOLOGI**

**Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pelaku usaha perikanan di PPSNZ sedangkan data sekunder berasal dari laporan tahunan, statistik perikanan dan berbagai referensi yang mendukung kegiatan penelitian.

**Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2014 dengan mengambil lokasi di PPSNZ Muara Baru, Jakarta Utara.

**Metode Pengumpulan Data**

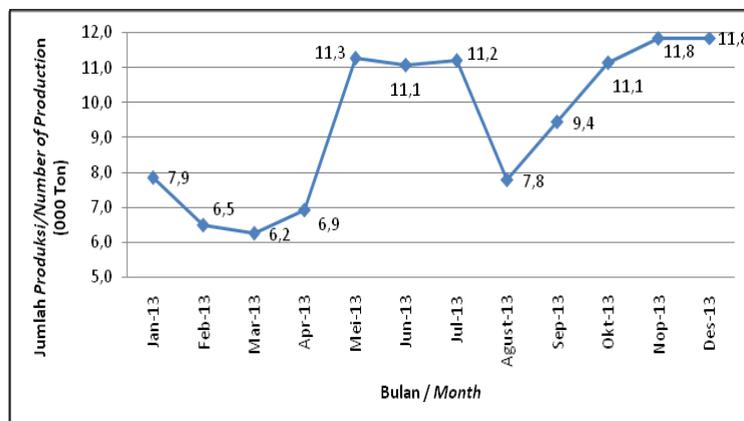
Pengumpulan data primer secara random sampling dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan alat bantu kuesioner sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur.

**Metode Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata jumlah kapal yang mendarat di PPSNZ menurut WPP, besarnya GT, jenis ikan, dan kebutuhan BBM.

**JUMLAH PRODUKSI DAN JENIS TANGKAPAN**

Jumlah produksi ikan tahun 2013 dari kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ berjumlah 113.024.086 kg dengan rata-rata produksi perbulan sebanyak 9.418.674 kg. Rata-rata kenaikan produksi ikan perbulan sebesar 6,10 %. Jenis ikan yang banyak ditangkap adalah jenis ikan cakalang (30 %), yellowfin tuna (15 %), bluefin tuna (13 %), cumi-cumi (10 %), layang (9 %) dan jenis ikan lain-lainnya (23 %). Produksi ikan di PPSNZ cukup berfluktuasi dimana jumlah produksi ikan tertinggi terjadi di bulan Nopember dan Desember sedangkan jumlah produksi ikan terendah ada di bulan Februari dan Maret. Fluktuasi bulanan produksi ikan dari PPSNZ dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



**Gambar 1. Produksi Ikan yang Didaratkan di PPS Nizam Zachman Menurut Bulan, Tahun 2013**  
**Picture 1. Number of Landing Fish Production on PPS Nizam Zachman Monthly, in 2013**

Sumber : PPSNZ, 2014 (diolah) / Source: PPSNZ, 2014 (processed)

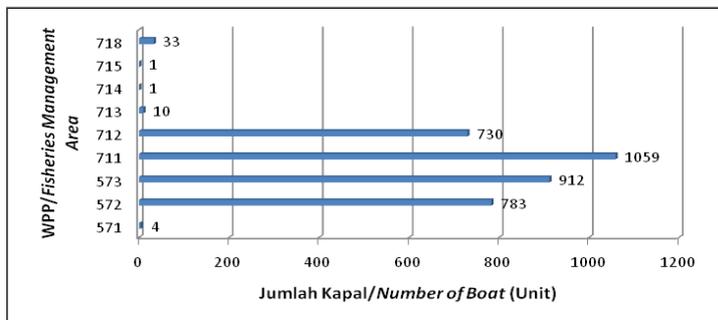
**LOKASI PENANGKAPAN IKAN**

Wilayah maritim Indonesia menurut Peraturan Menteri (Permen) No. PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terdapat 11 WPP yang terdiri atas: 1) WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman); 2) WPP 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda); 3) WPP 573 (perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat); 4) WPP 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan); 5) WPP 712 (perairan Laut Jawa); 6) WPP 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali); 7) WPP 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda); 8) WPP 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau); 9) WPP 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera); 10) WPP 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik); dan 11) WPP 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur). Kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ pada umumnya menangkap ikan di 9 lokasi WPP yaitu di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711,

WPP 712, WPP 713, WPP 714, WPP 715 dan WPP 718.

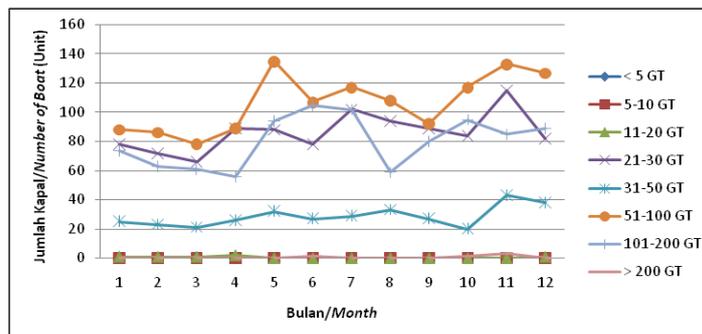
Rata-rata jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Nizam Zachman ada sebanyak 303 kapal dan rata-rata persentase kenaikan jumlah kapal per bulan sebesar 3,20 %. Pada tahun 2013, jumlah kapal yang menangkap ikan di WPP 711 adalah yang paling banyak jumlahnya yakni mencapai 1.059 unit (29,91 %), diikuti oleh WPP 573 sebanyak 912 unit (25,76 %), WPP 572 sebanyak 783 unit (22,11 %) dan WPP 712 ada sebanyak 730 unit (20,62 %) sedangkan kapal yang menangkap ikan di WPP lainnya berjumlah kurang dari 1%. Jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut WPP dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.

Berdasarkan ukuran kapal, kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ pada tahun 2013 didominasi oleh ukuran kapal 51 - 100 GT sebanyak 1.277 unit (35 %), 21 - 30 GT sebanyak 1.037 unit (29 %) dan 101 - 200 GT berjumlah 963 unit (27 %) dan sisanya sebanyak 10% adalah ukuran armada lainnya. Fluktuasi jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut ukuran kapal dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.



**Gambar 2. Jumlah Kapal yang Mendaratkan Ikan di PPSNZ Menurut WPP Tahun 2013**  
**Picture 2. Number of Fish Landing Boats on PPSNZ by Fisheries Management Area in 2013**

Sumber : PPSNZ, 2014 (diolah)/ Source : PPSNZ, 2014 (processed)



**Gambar 3. Jumlah Kapal yang Mendaratkan Ikan di PPSNZ Menurut Ukuran Kapal Tahun 2013**  
**Picture 3. Number of Fish Landing Boats by Vessel Size in 2013**

Sumber : PPSNZ, 2014 (diolah)/Source : PPSNZ, 2014 (processed)

Alat tangkap yang digunakan oleh armada penangkapan yang mendaratkan ikan di PPSNZ selama tahun 2013 cukup bervariasi yaitu terdiri atas bouke ami, bubu, gillnet, jaring cincin, longline, pukot cincin, pancing rawai, kapal pengangkut dan purse seine. Purse seine, longline dan bouke ami adalah jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan yang mendaratkan kapalnya di PPSNZ. Persentase jumlah alat tangkap pada kapal-kapal yang mendarat di PPSNZ dapat dilihat pada Gambar 4.

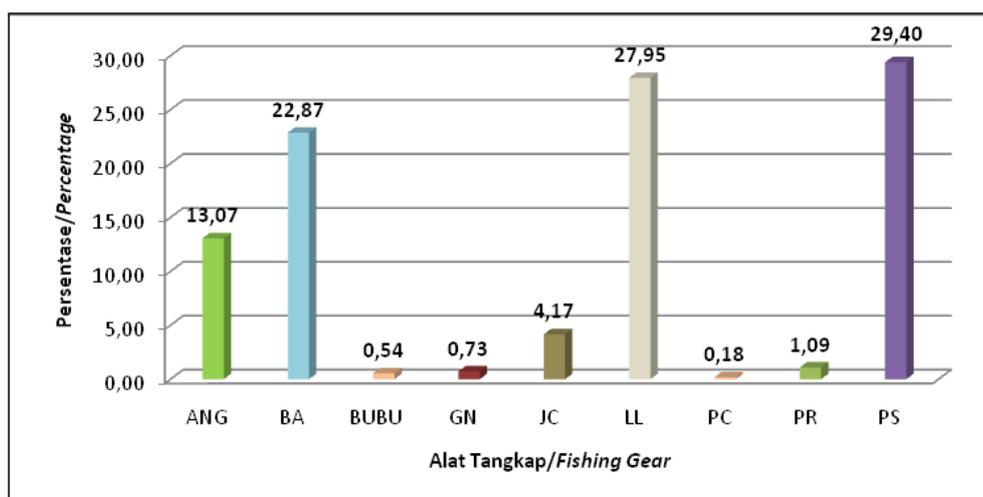
**ANALISIS USAHA KAPAL**

Pada tahun 2013 penerimaan kotor sesuai dengan ukuran armada kapal, dimana penerimaan kotor terkecil terdapat pada jenis armada 10 - 20 GT dan penerimaan terbesar pada ukuran 201 - 300 GT. Demikian halnya dengan pengeluaran total ketika melaut. Pada Tabel 1 ditampilkan perbandingan penerimaan dan pengeluaran pada armada.

Kebutuhan operasional yang dikeluarkan oleh nelayan di antaranya adalah pembelian solar. oli. es. air tawar. umpan. bahan makanan. upah nahkoda. upah abk dan biaya tambat labuh. Kebutuhan operasional dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan jenis alat tangkapnya kebutuhan operasional yang dibutuhkan oleh nelayan di sekitar PPSNZ menurut Isamuddin (2014) sebagai berikut Tabel 3.

PPSNZ memiliki aturan terkait penyaluran BBM yaitu kapal yang hendak mengisi BBM di PPSNZ harus memiliki surat ijin penangkapan dari PPSNZ dengan kuota sebesar 25 kilo liter (ton)/ bulan. Jika kapal tersebut berlayar selama 3 bulan maka kapal tersebut tetap memiliki kuota 25 Kilo liter/bulan bukan mendapatkan sebanyak 25 kliter dikali dengan 3 bulan di muka (pernah diterapkan di tahun 2011). hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM dengan harga subsidi. Jika melebihi kuota maka sisa BBM dikenakan dengan harga ekonomi yaitu Rp 11.300.-.



**Gambar 4. Jumlah Alat Tangkap Kapal Penangkap Ikan di PPSNZ Tahun 2013**

**Picture 4. Number of Fishing Gear on PPSNZ in 2013**

Sumber: PPSNZ, 2014 (diolah) Source : PPSNZ, 2014 (processed)

Keterangan (notes) : ANG = Pengangkut (carrier vessel); BA = Bouke Ami (stick held dip net); GN = Gillnet; JC = Jaring Cincin ; LL = Longline; PC = Pukat Cincin (purse seine alike); PR = Pancing Rawai (long line); PS = Purse Seine

**Tabel 1. Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran pada Armada.**

**Table 1. Comparison Between Revenue and Cost of Vessel.**

No	Jenis Armada/ Type of Vessel	Penerimaan Kotor/ Revenue	Pengeluaran Total/ Total Expenditure	RC Ratio
1	10-20 GT	129,140,000	80,191,000	1,61
2	20-30 GT	343,319,945	231,050,000	1,49
3	31-50 GT	511,993,130	484,560,000	1,06
4	51-100 GT	1,069,730,153	964,950,000	1,11
5	101 - 200 GT	1,864,298,386	1,012,950,000	1,84

Sumber : PPSNZ. 2014 (diolah)/Source: PPSNZ. 2014 (processed)

**Tabel 2. Biaya Operasional Kapal yang Mendarat di PPSNZ.****Table 2. Operational Cost of Vessel on PPSNZ.**

<b>Biaya Operasional/ Operational Cost</b>	<b>11-20 GT</b>	<b>21-30 GT</b>	<b>31-50 GT</b>	<b>51-100 GT</b>	<b>101-200 GT</b>
Jumlah Solar/Number of Fuel (Liter/litre)	10,000	25,000	45,000	75,000	75,000
Nilai Solar/Fuel Value	55,451,000	137,500,000	363,500,000	702,500,000	702,500,000
Oli/Lubricants	1,500,000	9,750,000	6,600,000	9,750,000	9,750,000
Es/Ice	0	3,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
Air Tawar/Freshwater	640,000	800,000	960,000	3,200,000	3,200,000
Umpan/Bait	4,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000
Ransum/Food and drink	7,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000
Upah Nahkodal/ Captain wage	1,500,000	4,000,000	7,000,000	15,000,000	15,000,000
Upah ABK/Other Crew wage	5,600,000	15,000,000	34,000,000	90,000,000	112,000,000
Biaya Tambat/ Labuh/ Anchoring cost	1,500,000	3,500,000	5,000,000	12,000,000	20,000,000
<b>Jumlah Total/ Total Value</b>	<b>80,191,000</b>	<b>231,050,000</b>	<b>484,560,000</b>	<b>964,950,000</b>	<b>1,012,950,000</b>

Sumber : PPSNZ. 2014 (diolah)/Source : PPSNZ. 2014 (processed)

**Tabel 3. Komponen Biaya Operasional Penangkapan Ikan Per Trip Per Alat Tangkap.****Table 3. Operational Cost of Vessel For Fishing Gear/Trip**

<b>Komponen/Component</b>	<b>Purse Seine</b>	<b>Longline</b>	<b>Bouke Ami</b>
Es/Ice	-	-	-
Garam/Salt	-	-	-
Ransum/Food and Drink	70,000,000	120,000,000	60,000,000
Umpan/Bait	-	270,000,000	-
Air Tawar/Freshwater	4,800,000	9,600,000	2,400,000
Solar/Fuel	247,500,000	607,500,000	202,500,000
Oli/Lubricants	7,600,000	7,600,000	7,600,000
Upah ABK/Crew Wage	68,250,000	83,700,000	14,560,000
Administrasi dan lain-lain/ Administration and others	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Tambat Labuh/Anchoring	2,000,000	2,000,000	2,000,000
<b>Jumlah/Total value</b>	<b>406,150,000</b>	<b>1,106,400,000</b>	<b>295,060,000</b>

Sumber : Issamuddin (2014)/ Source : Issamuddin (2014)

Kebutuhan nelayan akan BBM bersubsidi di PPSNZ didukung oleh empat SPBB dengan kapasitas sebagai berikut (Anonim<sup>1b)</sup>, 2013) : 1) SPBB PT. Amanah Putera Harun. Kapasitas 1.300 KL dengan rata-rata alokasi dari Pertamina 3.500 KL/bulan; 2) SPBB PT. Nugraha Adams Kapasitas 600 KL dengan rata-rata alokasi dari Pertamina 1.500 KL/bulan; 3) SPBB PT. Segara Lanjutan Dinya Kapasitas 450 KL dengan rata-rata alokasi

dari Pertamina 1.500 KL/bulan; dan 4) SPBB PT. Bumiyo Panduta Arta Kapasitas 450 KL dengan rata-rata alokasi dari Pertamina 1.000 KL/bulan. Dengan jumlah kapal yang mengisi solar rata-rata 227 sampai dengan 379 kapal/bulan maka kebutuhan rata-rata BBM / bulan adalah sebesar 7.341.549 Liter atau sekitar 7.341.5 KL. Jika terjadi kebijakan pembatasan solar sebesar 10 - 15 % maka akan terjadi pengurangan BBM

sebanyak 734.2 – 1.101.2 KL per bulan. Hal ini dapat berdampak pada aktivitas nelayan dalam menangkap ikan di laut.

Menurut Dewi (2004) pola konsumsi bahan bakar minyak di suatu wilayah pelabuhan banyak dipengaruhi oleh jumlah dan jenis kapal ikan yang secara aktif beroperasi di pelabuhan dimana semakin banyak jumlah kapal ikan yang beroperasi maka jumlah BBM yang dibutuhkan akan bertambah. Jumlah kapal yang beroperasi sangat tergantung dari musim penangkapan dan jenis kapal berpengaruh terhadap karakteristik kapal ikan, seperti waktu trip dan daerah operasi. Subsidi BBM bila dikaitkan dengan teori tentang subsidi, Todaro dan Smith (2009) menyatakan bahwa subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sedangkan menurut Spencer et. al dalam Handoko dan Patriadi (2005), subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

Prakiraan dampak yang terjadi jika pasokan BBM subsidi terganggu adalah :

1. Berkurangnya kesejahteraan nelayan

Kesejahteraan nelayan dapat berkurang karena berdasarkan pengamatan di lapang. banyak nelayan yang memilih strategi adaptasi untuk tidak melaut jika dilakukan pembatasan terhadap BBM. Mengurangi jumlah BBM sedikit kemungkinannya untuk dilakukan karena akan berdampak langsung pada jarak melaut. Hal ini dapat terjadi jika hasil tangkapan kurang sehingga nelayan cenderung mencari ikan dengan jarak lebih jauh lagi dan menambah hari sehingga membutuhkan BBM lebih banyak lagi (Kinseng, 2007).

2. Terjadi peningkatan harga ikan karena berkurangnya supply ikan dari nelayan

Peningkatan harga ikan ini dipicu oleh berkurangnya ikan di pasaran karena hanya sedikit nelayan melakukan aktivitas penangkapan sebagai akibat pembatasan BBM bersubsidi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Taslimahudin (2014) dimana bila ada kendala dengan supply BBM maka

nelayan lebih banyak tidak melaut selain itu dapat disebabkan juga adanya cuaca yang buruk.

3. Terjadi peningkatan kegiatan *illegal fishing*.

Peningkatan illegal fishing terjadi karena kapal-kapal di atas 30 GT sedikit yang melaut sehingga bila pengawasan sumberdaya kurang ketat dapat menyebabkan peningkatan pencurian ikan di perairan Indonesia.

## PENUTUP

Pembatasan kuota BBM bersubsidi terutama solar dapat berdampak negatif kepada sektor kelautan dan perikanan karena BBM merupakan input produksi yang paling penting. Pemotongan jatah solar sebanyak 10 - 15 % pada SPBU bertujuan untuk mengurangi beban negara namun dilain pihak juga dapat merugikan mereka yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan di laut. Pembatasan kuota BBM tersebut dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan nelayan karena semakin banyak nelayan yang tidak melaut. peningkatan harga ikan karena semakin berkurangnya pasokan ikan dari nelayan dan makin meningkatnya illegal fishing. BBM merupakan kebutuhan paling penting bagi nelayan dalam menangkap ikan di laut. sehingga bila terjadi kenaikan harga dan atau pembatasan kuota BBM bersubsidi dampak berdampak pada kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu meski kenaikan BBM dan atau pembatasan kuota BBM bersubsidi itu bertujuan mengurangi beban defisit APBN dan peningkatan infrastruktur namun hendaknya juga perlu ada kebijakan pemerintah yang lebih khusus memudahkan bagi nelayan dalam mendapatkan BBM. Sehingga meski BBM itu dinaikkan harganya atau dibatasi kuotanya. nelayan tetap dapat mendapatkan BBM yang dapat digunakan untuk menangkapa ikan di laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim<sup>1a</sup>). 2014. *KKP akan Perjuangkan Solar Subsidi untuk Nelayan*. <http://kaltim.tribunnews.com/2014/08/14/kkp-akan-perjuangkan-solar-subsidi-untuk-nelayan>
- Anonim<sup>1b</sup>). 2013. Pentingnya BBM Bersubsidi Untuk Nelayan. <http://www.ppsnzj.info/?p=118>

- BPS. 2014. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2014*. Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No 83/11/Th.XVI, 5 Noember 2014. [http://www.bps.go.id/brs\\_file/pdb\\_05nov14.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05nov14.pdf)
- Dewi, D.F.R. 2004. *Pola Konsumsi Dan Distribusi Bahan Bakar Kapal Ikan di Pelabuhan Ratu*. Skripsi. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/16114/C04dfd.pdf?sequence=2>
- Handoko, R dan P. Patriadi. 2005. *Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol 9 No. 4. Jakarta
- Issamuddin. 2014. *Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/69300/C14isa.pdf?sequence=1>
- KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2014. *Statistik Perikanan Tangkap Di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). 2005-2013*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 484 hal.
- Kinseng, R. A. 2007. *Konflik – konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia*. Soladity. Vol 1(1): 87 – 104.
- Mahyuddin. B. 2013. *Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Indonesia*. <http://fkpelabuhanperikanan.blogspot.com/2013/04/pengembangan-pelabuhan-perikanan-di.html>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/ Men/ 2006 tentang Pelabuhan Perikanan
- Peraturan Menteri (Permen) No. PER. 01/ MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- Rosalina. 2014. *Nelayan Butuh Solar Bersubsidi 27 Juta Kiloliter*. [http://brasil2014.tempo.co/konten-erita/analisa\\_bisnis/2013/04/23/475290/Nelayan-Butuh-Solar-Bersubsidi-27-Juta-Kiloliter](http://brasil2014.tempo.co/konten-erita/analisa_bisnis/2013/04/23/475290/Nelayan-Butuh-Solar-Bersubsidi-27-Juta-Kiloliter)
- Sinaga. G.V. A. Rosyid dan B.A. Wibowo. 2013. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology Volume 2. Nomor 1. Tahun 2013*. Hlm 43-55
- Suryowati, E. 2014. *Susi Targetkan Sektor Perikanan Sumbang 7 Persen dari PDB*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/21/170958026/Susi.Targetkan.Sektor.Perikanan.Sumbang.7.Persen.dari.PDB>
- Taslimahudin. 2014. *Kelangkaan BBM Berdampak Pada Ketersediaan Pasokan Ikan*. <http://mediacenter.batamkota.go.id/kelangkaan-bbm-berdampak-pada-ketersediaan-pasokan-ikan/>
- Todaro, M.P& S. C. Smith, 2009. *Economic Development (ed. 10th)*. Addison Wesley